

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR  
88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN E-  
GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



**NIM : 18221694**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR  
88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN E-  
GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
PONOROGO**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi Ini Disusun Oleh** : WAHYU TRI WITDIANTO  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 18221694  
**Judul** : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI  
(PERBUP) NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO  
**Disahkan Pada** : 28 Juni 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

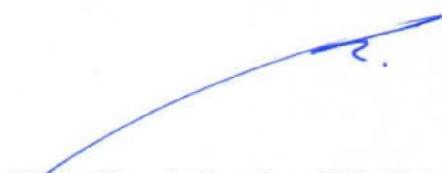
Pembimbing I



Khoirurrosyidin, S.I.P., M.Si

NIDN 0705057501

Pembimbing II



Robby Darwis Nasution, S.I.P, M.A

NIDN 0728028603

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

Disusun Oleh : WAHYU TRI WITDIANTO

NIM : 18221694

Telah dipertahankan di depan penguji pada : 19 Juli 2022

Hari : Selasa

Ruang : A203

Pukul : 13.00-14.00 WIB

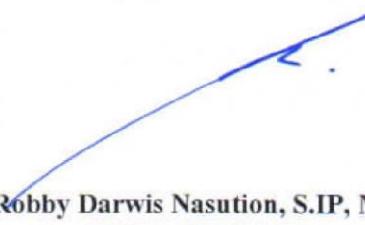
Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Penguji III

  
Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si  
NIDN 0722116201

  
Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A  
NIDN 0728028603

  
Khoirurrosyidin, S.IP, M.Si  
NIDN 0705057501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayuh Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D

NIK 19860325 201309 12

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya, ayah Sarwan dan mamak Maryati yang selama ini tanpa lelah memberikan doa baik untuk saya hingga bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana, terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan segalanya untuk saya. Dan teman yang selalu menemani saya, Tian Ovi Septiyana yang menjadi semangat baru di hidup saya. Terimakasih atas doa dan segala dukungannya.



## MOTTO

*“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”*

**-Ali Bin Abu Thalib-**

*“Jangan Menjelaskan Tentang Dirimu Kepada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Butuh Itu. Dan Yang Membencimu Tidak Percaya Itu”*

**-Ali Bin Abu Thalib-**

*“Berfikirlah Bahwa Nasib Mereka Lebih Buruk Darimu Maka Kamu Akan Mengerti Rasa Bersyukur”*

**-WTW-**



## ABSTRAK

Dalam rangka percepatan dan peningkatan di bidang pelayanan perizinan khususnya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Ponorogo, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* kemudian Pemerintahan Kabupaten Ponorogo meneruskan INPRES tersebut dengan terbitnya PERBUP Nomor 88 Tahun 2019 untuk mewujudkan inovasi dari program *E-Government* dimana dalam PERBUP tersebut dimaksudkan terwujudnya pendelegasian kewenangan Bupati kepada kepala DPMPTSP dimana dengan PERBUP ini seluruh bentuk pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal dilimpahkan kepada DPMPTSP. Terciptanya PERBUP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Ponorogo maka dari itu, dinas melakukan pengembangan pelayanan berbasis digital dengan mengeluarkan layanan melalui aplikasi yaitu *Online Single Submission (OSS)*, sistem informasi perizinan terpadu (SIJITU), dan *Ponorogo Investment Service Center (PISC)*, dengan aplikasi OSS dan SIJITU yang merupakan sistem pelayanan perizinan dengan tujuan untuk mempermudah pengajuan surat izin dari pemerintah dan menciptakan model pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, memberikan kepastian, dan tentunya kini pelayanan ini juga jauh dari resiko pungli dan pengurusan yang berbelit-belit dan aplikasi PISC untuk memaksimalkan pengelolaan potensi di ponorogo untuk para investor guna kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 Terkait pendelegasian kewenangan dalam mewujudkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil implementasi berupa layanan yang berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat di dunia saat ini, dengan layanan yang telah disediakan dinas yaitu Aplikasi adalah OSS, SIJITU, dan PISC. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala-kendala yang membuat dinas harus segera berupaya untuk mencari solusi untuk setiap kendala yang muncul guna memaksimalkan sistem pelayanan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan terkait pengembangan *e-government* dalam pemerintahan khususnya di bidang pelayanan perizinan ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat baik yang diberikan oleh pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, yakni dengan kemudahan mendapatkan surat izin tanpa harus memerlukan waktu yang lama, biaya yang banyak, tenaga yang terbuang akibat berbelit-belitnya proses izin, dan terhindar dari risiko terjadinya pungli. Semua pengerjaan bisa langsung diurus *online* tanpa perlu datang ke kantor.

**Kata Kunci:** Implementasi PERBUP, Pelayanan perizinan, *e-government*

## **ABSTRACT**

*In the context of accelerating and improving in the field of licensing services, especially in the Office of Investment and Integrated Services in Ponorogo Regency, through Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning National Policies and Strategies for E-Government the Ponorogo Regency Government continued the INPRES with the issuance of PERBUP Number 88 of 2019 to realize innovations from the E-Government where in the PERBUP it is intended to realize the delegation of the Regent's authority to the head of the DPMPTSP where with this PERBUP all forms of licensing services and investment services are delegated to DPMPTSP. The creation of this PERBUP is expected to improve the quality of services in Ponorogo Regency, therefore, the agency is developing digital-based services by issuing services through applications, namely Online Single Submission (OSS), Integrated Licensing Information System (SIJITU), and Ponorogo Investment Service Center (PISC), with OSS and SIJITU applications which are licensing service systems with the aim of facilitating the application of permits from the government and creating an integrated licensing service model that is fast, cheap, provides certainty, and of course now this service is also far from the risk of extortion and convoluted management and PISC applications to maximize the management of potential in ponorogo for investors for sustainable development progress. The purpose of this study is to determine the form of implementation of Regent's Regulation Number 88 of 2019 Regarding the delegation of authority in realizing national policies and strategies for e-government at the Ponorogo Regency Investment and Integrated Service Office. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the implementation are in the form of digital-based services by utilizing information and communication technology that has developed rapidly in today's world, with services that have been provided by the service, namely Applications, namely OSS, SIJITU, and PISC. However, in the implementation process, there are still many obstacles that make the agency must immediately try to find a solution for any obstacles that arise in order to maximize the service system so that it runs effectively and efficiently. With the policies related to the development of e-government in the government, especially in the field of licensing services, the public will get the good benefits provided by the government, especially the Office of Investment and One-Stop Integrated Services of Ponorogo Regency, namely with the ease of getting a permit without having to take a long time, , a lot of costs, wasted energy due to the convoluted permit process, and avoid the risk of extortion. All work can be directly handled online without the need to come to the office.*

**Keywords:** PERBUP implementation, licensing services, e-government

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.”

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis membutuhkan peran serta dari pihak lain dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak dapat disangkal pula bahwa dalam pengerjaannya pun butuh usaha yang keras dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Ayub Dwi Anggoro, S.Ikom., M.Si., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, yang telah menyetujui penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan izin penulis an.
4. Bapak Khoirurrosyidin, S.IP, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan pada penulis.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulis an ini.

6. Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah memberikan bantuan penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongannya mendapat berkah dari Allah SWT.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, walapun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Demikian ucapan terima kasih ini, apabila ada salah-salah kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : WAHYU TRI WITDIANTO  
NIM : 18221694  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "*IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO*" adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NOW EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ponorogo, 28 Juni 2022

Yang Menyatakan



WAHYU TRI WITDIANTO

NIM 18221694

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMPAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PENYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Penegasan Istilah.....	13
F. Landasan Teori.....	17
G. Definisi Operasional.....	26
H. Metodologi Penelitian .....	27
<b>BAB II DESKRIPSI OBJEK PENULISAN .....</b>	<b>33</b>
A. Kondisi Geografis Objek Penelitian.....	33
B. Kondisi Demografis Objek Penelitian .....	36
C. Data Teknis Objek Penelitian .....	38

<b>BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>62</b>
A. Penyajian Data.....	62
B. Analisis Data .....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo .....	34
Tabel 2.2 Letak Kabupaten Ponorogo dari kedalaman Laut .....	34
Tabel 2.3 Luas Wiayah Kec. Dan Jumlah Desa/Dusun Pada Tiap Kec.....	35
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kab. Ponorogo Menurut Kec. Tahun 2018 .....	37
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	44
Tabel 2.7 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 2.8 Jenis-Jenis Perizinan Berusaha Melalui Aplikasi OSS .....	47
Tabel 2.9 Jumlah Perizinan Masuk Melalui Aplikasi OSS .....	53
Tabel 2.10 Jenis-Jenis Perizinan Non OSS Dan Non Perizinan .....	54
Tabel 2.11 Jumlah Perizinan Masuk Melalui Aplikasi SIJITU .....	56
Tabel 2.12 Jumlah Non Perizinan Yang Masuk.....	57
Tabel 2.13 Jumlah Potensi Investasi Yang Masuk Aplikasi PISC.....	58
Tabel 3.1 Data Informan .....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 2 Proses Analisis Data.....	32
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	33
Gambar 2.2 Peta Lokasi DPMPTSP .....	36
Gambar 2.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ponorogo .....	43
Gambar 2.4 Halaman Utama Website OSS .....	46
Gambar 2.5 Halaman Utama Website SIJITU .....	54
Gambar 2.6 Halaman Utama Website PISC .....	58